

Catatan Diskusi Seni Lukis di TIM**Kembalikan Seni Lukis pada Rakyat**

Baru-baru ini ada diskusi Seni Lukis Indonesia di TIM Jakarta. Diskusi yang memakan waktu dua malam dengan para pembicara dan penyanggahnya yang cukup berbobot untuk ukuran Indonesia itu, sehubungan dengan Pameran Besar Seni Lukis Indonesia ke IV 1980 - 1981.

Bukan alat politik

Dalam paper diskusinya **Hardi** menyatakan bahwa tonggak-tonggak kesenian Indonesia selalu dibangun dari tangan dan pikiran seniman yang berorientasi pada persoalan masyarakatnya. Sebagai contoh ia sebut Persagi-nya **Sudjojono**, Pelukis Rakyatnya **Affandi**, Dramanya **Rendra** dan sebagainya sampai Seni Rupa Baru. Sedangkan **Bambang Bujono** dalam penutup paper diskusinya menyatakan bahwa sejarah seni rupa Indonesia bukan digerakkan oleh satu persatu prestasi senimannya. Tapi digerakkan oleh adanya satu pemikiran kelompok yang menggebrak, atau satu tantangan sosial yang menantang kita sebagai satu bangsa. Persagi, lukisan-lukisan perjuangan, zaman lembaga kebudayaan dan Seni Rupa Baru.

Sejarah mencatat bahwa tidaklah kecil peranan Persagi dalam mendobrak nilai-nilai elitisme atau *moote indie* yang dianut oleh pelukis **Basuki Abdullah** dan kawan-kawan dimasa kolonialisme Belanda. Senilukis yang berangkat dari istana ke istana, senilukis yang mempercantik keadaan yang sebenarnya kotor dan busuk. Maka bukanlah hal yang mustahil bila kesenian mereka menimbulkan distansi dengan masyarakatnya. Lalu dengan semangat revolusionernya kelompok Persagi menggempurnya

dan memulangkannya nilai senilukis kepada rakyat, dimana pada tahun 1935-an itu memang sedang gigihnya bangsa kita mengusir kolonialisme Belanda. Dan dijadikanlah senilukis sebagai senjata.

"Tentara berjuang dengan senapan, saya lukiskan!" begitu kata **Affandi** pula **Sudjojono** dan kawan-kawan yang mem-persetankan teknik akademis "Teknik tidak penting, isi jiwa ini tumpahkanlah diatas kanvas!" Kitapun segera maklum dan menjadi jelas sikap seni lukis dimasa itu yakni; **nasionalisme**. Senilukis manunggal dengan rakyatnya.

Dan dimasa sesudah perang kemerdekaan selesai, senilukis Indonesia menjadi kacaubalau sikapnya. Satu segi berpaling pada kesenian non-representasionil yang diimport dari barat, dan segi lain berpaling pada ideologi politik. Senilukis kita dimasa itu telah mengkhianati masyarakatnya dan nilainya pun

menjadi kotor. "Kesenian bukan alat politik. Kesenian yang menyerahkan dirinya kearah politik ia telah berhenti dari kodratnya, menjadi tangan politik yang tak berjiwa..." Begitu kata **Hardi** lagi.

Setelah terbenamnya G 30 S, maka terbenam pulalah senilukis yang berkiblat pada politik. Rakyatpun bersoraksorai dengan penuh harapan agar senilukis akan kembali kepangkuannya. Namun sejarah menghendaki lain. Pelukis-pelukis berbondong meninggalkan masyarakatnya menuju "menara gading" yang penuh dengan taman-taman sorgawi. Bahkan mereka disana mengadakan kaderisasi dengan mendirikan Akademi-akademi. Hanya para mahasiswa yang sadar akan eksistensinya sebagai mahluk sosial sajalah

yang kemudian melarikan diri atau memang diusir dari "istana menara gading" itu. Kemudian mendirikan kelompok-kelompok yang berorientasi pada masyarakat.

Bukanlah hanya rahasia masyarakat seniman saja bahwa senilukis Indonesia telah menjadi milik kaum elite dan borjouis belaka, baik itu dalam harga maupun bentuk dan kondisi yang diciptakan pelukis. Keadaan demikian telah 'menghantui' masyarakat kita sejak berdirinya **Orde Baru** sampai kini - walaupun tidak seluruh pelukis demikian. Performace seni yang demikian jelas membodohi image masyarakat, apalagi ditambah para kritikus mendukungnya.

Dewasa ini untuk mengagungkan kebebasan kreatif masih dirasakan amat terbatas, seperti apa yang

dikatakan **Sudarmadji** dalam penutup papernya. Atau seperti yang dikatakan **Hardi**; "Saat ini, dalam zaman yang penuh ke-kaburan istilah, seorang pelukis yang melukis tentang kemanusiaan, bisa disergap sebagai pelukis politik. Saat ini orang yang melukis tentang kenyataan, disergap menjadi pelukis protes atau semacamnya."

Hambatan-hambatan inilah yang membuat gerak perjuangan beberapa seniman terasa terhambat, karena faktor-kewenangan dari semua pihak tidak seiring-sejalan. Seperti apa yang dinyatakan oleh **Krishna Mustajab** dalam paper-nya yang setebal 28 halaman yakni; kewenangan senilukis, kewenangan budaya (cultural authority) dan kewenangan politik. (**Slamet Ryadhi Pr**)